

**DAMPAK PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HELEBEIK
KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO**

Jamin Habid
Fakultas ekonomi, Program Studi Manajemen
Universitas Nusa Lontar Rote
Email : j4minhabid@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Penggunaan ADD akan berdampak positif bergantung pada sejumlah faktor yakni sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang berlokasi di Desa Helebeik ini, adalah dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diukur menggunakan teori efektivitas yakni : Prioritas Kebutuhan, Ketepatan Waktu, Manfaat dan Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik yang merupakan kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Untuk menjawab masalah penelitian, tujuan dan hipotesis penelitian maka dikumpulkan data dari sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari Aparat Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW, Lembaga Adat, Lembaga PKK, Pemuda, Linmas dan juga Masyarakat sebagai penerima manfaat dengan menggunakan teknik kuisioner. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik Analisis Capaian Indikator yang kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa yang diukur dari indikator Prioritas capaiannya adalah 97,5 %, Ketepatan Waktu capaiannya adalah 67,92 %, Manfaat capaiannya adalah 43,86 %, dan Hasil capaiannya adalah 60,18 %. Dan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 43,86 % yang mana Indikator Manfaat digunakan sebagai indikator Kesejahteraan dan dikategorikan Tidak Efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi Kebijakan dan Kesejahteraan

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima oleh desa-desa untuk membiayai seluruh program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud pemenuhan hak desa.

Perhatian pemerintah dalam pemerataan pembangunan cukup besar, hal ini terlihat dari adanya program dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di pedesaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aliran dana dari pusat ke daerah juga merupakan sebagai implikasi dari adanya otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan Desa (Prasetyo & Masdjojo, 2013).

Desa Helebeik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2018 sebagai mana yang diamanatkan oleh undang-undang telah menjalankan tugas dan fungsi otonomi dalam mengurus kepentingan masyarakat dalam sebuah kebijakan pengelolaan

Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Helebeik Tahun Anggaran 2018 yang meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang didalamnya Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan dari Aparat Desa dan BPD, Kegiatan Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, RT/RW. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDes), Pengelolaan Informasi Desa, Penetapan Peraturan Desa, Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengelolaan Aset Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi Pembangunan Sarana Air Bersih, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, PAUD, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, Penyediaan Bibit Unggul dan pengadaan sarana dan prasarana layanan umum lainnya.
3. Bidang Pembinaan masyarakat meliputi kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK, Pembinaan Lembaga Adat dan Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan yaitu Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa.

Dalam uraian pelaksanaan program/kegiatan APBDes Helebeik Tahun 2018 ternyata didapati bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik itu pengambilan kebijakan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa ternyata masih mengalami berbagai macam kendala maupun persoalan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa karena belum sinerginya pemahaman antara Kepala Desa dengan Aparat, antara Aparat dengan BPD, antara pemerintah dan masyarakat, dan masih adanya kepentingan-kepentingan yang menonjol yang pada akhirnya berimbas pada pelaksanaan program itu sendiri, transparansi penggunaan anggaran, adanya ketidakmampuan mengelola dari para aparat sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu sehingga pertanggungjawaban melewati batas yang ditentukan.

Sebagaimana tujuan dari pada setiap pelaksanaan program kegiatan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat Desa Helebeik sejauh ini masih ada belum menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya karena kebutuhan mendasar seperti makan minum, rumah yang layak huni, kesehatan, akses air bersih, dan pendidikan masih menjadi persoalan mendasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Helebeik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao**”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Helebeik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Helebeik.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Akademik
Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide dan pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

G. Tinjauan Pustaka

a. Landasan Teori

1. Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2002:14-20) dengan Judul Buku *Akuntansi Keuangan Daerah*, efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Untuk mengukur

efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat (Aziz, 2016).

Mahmudi (2015:86) dengan judul buku *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Kriteriapenilaianrasioefektivitasdapatdikelompokkansebagaiberikut:

Tabel 2.1
KriteriaPenilaianRasioEfektivitas

NilaiEfektivitas	Persentase
SangatEfektif	>100%
Efektif	85-100%
CukupEfektif	65%-84%
KurangEfektif	50-64%
TidakEfektif	<50%

Sumber: Mahmudi, (2015:86)

2. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang – Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang 10 bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang

di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi Dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

4. Pengertian Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Nugroho:2004:130), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Berkaitan dengan Implementasi dalam konteks ini adalah Implementasi kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2003:17-18) Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu Implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan public.

Menurut Nugroho (2004:158-159), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dengan turunan dari kebijakan publik tersebut.

5. Pengertian Kebijakan

Kartasasmita dalam Edy Sutrisno (2009:15), mengatakan bahwa kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Mustopadidjaja, (2002) Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

6. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Fahrudin, (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

H. Definisi Operasional Konsep

Berdasarkan landasan teori dari setiap variabel penelitian tersebut, maka secara operasional didefinisikan sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target telah dicapai.
2. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan merasakan ketentraman lahir dan batin.
3. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari pada hal yang lain.

4. Ketetapan waktu adalah waktu yang telah ditentukan.
5. Manfaat adalah faedah atau guna yang dirasakan dari sesuatu yang dilakukan.
6. Hasil adalah sesuatu yang diadakan sesuai dengan harapan.

I. Indikator Empirik Dan Skala Pengukuran Konsep

Indikator empirik merupakan karakteristik dari setiap variabel penelitian yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Indikator empirik dan skala pengukuran konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Empirik dan Skala Pengukuran Konsep

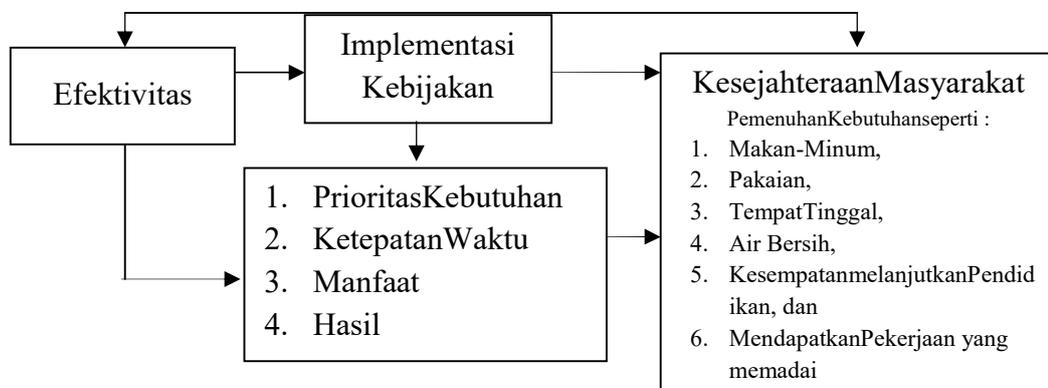
Variabel Penelitian	Indikator Empirik	Skala Ukur
Efektifitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas Kebutuhan b. Ketepatan Waktu c. Manfaat d. Hasil 	Interval

J. Kerangka Pikir Dan Hipotesis

Kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini menggambarkan variabel Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui

Implementasi Kebijakan dalam mencapai Kesejahteraan Masyarakat. Kerangka berpikir secara skematis digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Berpikir Efektivitas Pengelolaan ADD dan Kesejahteraan Masyarakat



Model kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa efektivitas melalui implementasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, ukuran yang dipakai dalam menghitung efektivitas maupun implementasi kebijakan dapat diukur dengan 4 indikator yaitu prioritas kebutuhan, ketepatan waktu, manfaat dan hasil. Dengan semakin efektifnya pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan melalui implementasi kebijakan maka kesejahteraan masyarakat tercapai, begitu pula bila kesejahteraan masyarakat tercapai maka menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa itu efektif.

K. Hipotesis Penelitian

- a. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat.

$H_0 : b = 0$ artinya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Helebeik

$H_a : b \neq 0$ artinya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Helebeik

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

B. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Aparat Desa Helebeik.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD, Kaur, RT/RW, Lembaga Adat, PKK, Kepala Dusun, Linmas ataupun Masyarakat sebagai penerima/pemanfaat. Dengan Rincian : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara 1 orang, Kaur 2 orang, BPD 2 orang, Kepala Dusun 4 orang, RT/RW 4 orang, Lembaga adat 1 orang, PKK 2 orang, Linmas 2 orang, Pemuda 1 orang, Kader Posyandu/PAUD 2 orang dan masyarakat 4 orang.

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk pernyataan dari responden berupa jawaban atas pertanyaan penelitian dari variabel-variabel dan indikator empirik.

b. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari informan) melalui hasil kuisioner yang didukung oleh pengamatan/observasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari arsip, laporan, buku-buku atau dokumentasi desa Helebeik.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan dalam bentuk pengamatan langsung pada obyek penelitian.
- b. Kuisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh respondent.

- c. Studi Dokumenter, yaitu data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Helebeik.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan jalan penyortiran terhadap kuisioner yang diisi oleh responden dan disusun kembali menurut nomor urut sampel.
2. *Coding*, yaitu teknik pengolahan data dengan cara pemberian kode pada setiap jawaban respondent.
3. *Tabulating*, yaitu penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui distribusi jawaban responden.

F. Teknik Analisis Data

a. Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini analisis ditujukan untuk mentabulasi data penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekwensi untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden baik secara absolut maupun persentase kemudian

dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian.

b. Analisis Lanjutan

Pada tahapan analisis lanjutan ini akan dibahas lebih komprehensif terhadap hasil analisis pendahuluan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk membahas lebih lanjut setiap indikator empirik dan menganalisisnya untuk menjawab tujuan penelitian.

Motode statistik yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Indikator

Analisis Capaian Indikator digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Rumus yang digunakan menurut Riduwan (2010:88) yaitu :

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Jawaban Responden}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- CI : Capaian Indikator
- JR : Jawaban Resposden
- SI : Skor Ideal

Tabel 3.1
Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
91 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
61 % - 79 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No.690.900-327

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Adapun yang menjadi respondent dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat sebagai pelaku

dan penerima manfaat langsung yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur, RT/RW, BPD, Lembaga Adat, PKK, Linmas, Pemuda, Kepala Dusun atau perwakilan masyarakat yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	23	77 %
2	Perempuan	7	23 %
Total		30	100 %

Sumber : Data primer yang diolah

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu 77 %.

2. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden menurut pekerjaan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sarjana (S1)	4	13 %
2	SMA	8	27 %
3	SMP	2	3 %
4	SD	16	53 %
Total		30	100 %

Sumber : Data primer yang diolah

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari pada responden yang paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu 53 %.

indikator untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Deskripsi hasil penelitian berdasarkan instrumen yang digunakan dari setiap

Tabel 4.3

Jumlah Jawaban Responden Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Indikator	Jumlah (orang)	Perhitungan (3 item pertanyaan x responden)	Persentase
1	Prioritas	6	CI = 18/18 x 100 %	100
2	Ketepatan Waktu	6	CI = 14/18 x 100 %	78
3	Manfaat	6	CI = 18/18 x 100 %	100
4	Hasil	6	CI = 13/18 x 100 %	72
Total		6		350

Sumber : Data primer yang diolah

Data dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prioritas

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator prioritas menunjukkan

- bahwa dari 6 orang yang diteliti (100 %) merupakan prioritas kebutuhan berupa Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium, Dukungan Biaya Operasional (ATK, Makan, Minum, Listrik, BBM), serta perencanaan pembangunan desa, pengelolaan informasi desa, penetapan peraturan desa dan pengelolaan aset desa.
- b. Ketepatan Waktu Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator ketepatan waktu menunjukkan 6 orang yang diteliti (78 %) pembayaran gaji, tunjangan maupun honorarium, pengadaan kebutuhan operasional (ATK, Makan, Minum, Listrik, BBM), perencanaan pembangunan desa, pengelolaan informasi desa, penetapan peraturan desa dan pengelolaan aset desa diselesaikan tepat waktu.
- c. Manfaat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator manfaat menunjukkan 6 orang yang diteliti (100 %) adanya peningkatan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan setelah menerima gaji, tunjangan maupun honorarium, adanya peningkatan semangat kerja, disiplin kerja dan kreatifitas dalam berkerja dengan adanya dukungan biaya operasional (ATK, Makan-Minum, Listrik, BBM), adapetunjuk dan pedoman kegiatan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan informasi desa, penetapan peraturan desa dan pengelolaan aset desa.
- d. Hasil Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator hasil menunjukkan 6 orang yang diteliti (33 %) terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makan-minum, pakaian, tempat tinggal, air bersih dan biaya pendidikan dan (67 %) belum terpenuhinya kebutuhan pokok, (100 %) adanya peningkatan jam kerja dan juga masuk keluar kantor serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat setelah menerima gaji, tunjangan maupun honorarium. Dan (83 %) ada RKPDEs yang telah disusun, ada informasi yang disajikan, ada perda yang ditetapkan dan aset desa yang dikelola secara baik, (17 %) tidak ada RKPDEs yang telah disusun, ada informasi yang disajikan, ada perda yang ditetapkan dan aset desa yang dikelola secara baik.
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**
Deskripsi hasil penelitian berdasarkan instrumen yang

digunakan dari setiap indikator untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi

Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Pembangunan Desa sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Jawaban Responden Bidang Pembangunan Desa

No	Indikator	Jumlah (orang)	Perhitungan (3 item pertanyaan x responden)	Persentase
1	Prioritas	8	CI = 21/24 x 100 %	87,5
2	Ketepatan Waktu	8	CI = 12/24 x 100 %	50,0
3	Manfaat	8	CI = 14/24 x 100 %	58,3
4	Hasil	8	CI = 15/24 x 100 %	62,5
<i>Total</i>		8		258,3

Sumber : Data primer yang diolah

Data dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prioritas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator prioritas dari 8 orang yang diteliti menunjukkan (87,5 %) kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih, Gapura dan Tanda Batas Desa, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, Penyelenggaraan PAUD, Jalan Usaha Tani, Pemeliharaan Jalan Desa dan Penyediaan Bibit Unggul menjadi kebutuhan utama dan (12,5 %) tidak menjadi kebutuhan utama.
2. Ketepatan Waktu Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator ketepatan waktu dari 8 orang yang diteliti menunjukkan bahwa dari dimulainya proses perencanaan,

- pelaksanaan dan penyelesaian/pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih, Gapura dan Tanda Batas Desa, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, Penyelenggaraan PAUD, Jalan Usaha Tani, Pemeliharaan Jalan Desa dan Penyediaan Bibit Unggul hanya mencapai (50 %).
3. Manfaat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator manfaat dari 8 orang yang diteliti menunjukkan (58,3 %) adanya peningkatan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, (41,7 %) tidak ada peningkatan kesejahteraan dari kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih, Gapura dan Tanda Batas Desa, Pengelolaan dan

- Pembinaan Posyandu, Penyelenggaraan PAUD, Jalan Usaha Tani, Pemeliharaan Jalan Desa dan Penyediaan Bibit Unggul.
4. Hasil Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator hasil dari 8 orang yang diteliti menunjukkan (62,5 %) terpenuhinya kebutuhan air bersih, adanya peningkatan pelayan dari kader Posyandu dan guru PAUD, adanya akses transportasi dari dan menuju lokasi pertanian, adanya jalan

penghubung antar dusun, dan tersedianya bibit unggul. Dan (37,5 %) menunjukkan hal yang sebaliknya.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Deskripsi hasil penelitian berdasarkan instrumen yang digunakan dari setiap indikator untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Jawaban Responden Bidang Pembinaan Masyarakat

No	Indikator	Jumlah (orang)	Perhitungan (3 item pertanyaan x responden)	Persentase
1	Prioritas	6	CI = 18/18 x 100 %	100
2	Ketepatan Waktu	6	CI = 16/18 x 100 %	89
3	Manfaat	6	CI = 3/18 x 100 %	17
4	Hasil	6	CI = 13/18 x 100 %	72
<i>Total</i>		<i>6</i>		<i>278</i>

Sumber : Data primer yang diolah

Data dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prioritas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator prioritas dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (100 %) kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan Linmas, pembinaan organisasi perempuan/PKK, Pembinaan Lembaga Adat dan

- penyelenggaraan olahraga sebagai kebutuhan utama.
2. Ketepatan Waktu Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator ketepatan waktu dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (89 %) kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan Linmas, pembinaan organisasi perempuan/PKK, Pembinaan Lembaga Adat dan

penyelenggaraan olahraga dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dilakukan tepat waktu, (11 %) tidak tepat waktu.

3. Manfaat

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator manfaat dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (17 %) kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan Linmas, pembinaan organisasi perempuan/PKK, Pembinaan Lembaga Adat dan penyelenggaraan olahraga memberikan manfaat terpenuhinya kebutuhan Makan-Minum, Pakaian, Tempat Tinggal, Air Bersih, Kesempatan, melanjutkan Pendidikan dan Mendapatkan Pekerjaan yang memadai, sedangkan (83 %) tidak dapat meningkatkan kesejahteraan atau tidak terpenuhinya kebutuhan utama.

4. Hasil

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator hasil dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (72 %) memberikan hasil ada rasa aman, tentram, dan tertib yang dirasakan masyarakat,

keterampilan yang dimiliki dan beragam menu yang dihasilkan oleh organisasi perempuan/PKK dalam menunjang ekonomi keluarga dan juga dapat mewakili Desa dalam mengikuti event-event di luar desa, adanya kebijakan dan peraturan-peraturan yang disosialisasikan kepada masyarakat, pengurangan kenakalan dan pengangguran anak muda maupun atlet-atlet yang dihasilkan setelah adanya pelatihan Linmas, kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan Linmas, pembinaan organisasi perempuan/PKK, Pembinaan Lembaga Adat dan penyelenggaraan olahraga, sedangkan (28 %) hal yang sebaliknya atau tidak memberikan hasil.

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Deskripsi hasil penelitian berdasarkan instrumen yang digunakan dari setiap indikator untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Jawaban Responden Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Jumlah (orang)	Perhitungan (3 item pertanyaan x responden)	Persentase
1	Prioritas	4	CI = 18/12 x 100 %	100
2	Ketepatan Waktu	4	CI = 8/12 x 100 %	67
3	Manfaat	4	CI = 4/12 x 100 %	33
4	Hasil	4	CI = 6/12 x 100 %	50
<i>Total</i>		4		250

Sumber : Data primer yang diolah

Data dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prioritas

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator prioritas dari 4 orang yang diteliti menunjukkan (100 %) kegiatan pelatihan menjahit dan meubeler menjadi prioritas kebutuhan utama.

2. Ketepatan Waktu

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator ketepatan waktu dari 4 orang yang diteliti menunjukkan (76 %) kegiatan pelatihan menjahit dan meubeler dimulai dan diakhiri tepat waktu, sedangkan (33 %) menunjukkan waktu yang disediakan untuk kegiatan pelatihan belum cukup.

3. Manfaat

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator manfaat dari 4 orang yang diteliti menunjukkan (33 %) kegiatan pelatihan menjahit dan meubeler membawa manfaat terpenuhinya kebutuhan utama akan Makan-

Minum, Pakaian, Tempat Tinggal, Air Bersih, Kesempatan, melanjutkan Pendidikan dan Mendapatkan Pekerjaan yang memadai, sedangkan (67 %) hal sebaliknya atau tidak terpenuhinya kebutuhan utama.

4. Hasil

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator hasil dari 4 orang yang diteliti menunjukkan (50 %) setelah mengikuti kegiatan pelatihan menjahit dan meubeler adanya hasil yang nampak yaitu adanya produk yang dihasilkan seperti pakaian, perabot rumah tangga dan ada pengasilan yang dapat ditabung.

5. Bidang Penyertaan Modal unruk BUMDES

Deskripsi hasil penelitian berdasarkan instrumen yang digunakan dari setiap indikator untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat pada Bidang
Penyertaan Modal untuk

BUMDES sebagai
berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Jawaban Responden Bidang Penyertaan Modal untuk BUMDES

No	Indikator	Jumlah (orang)	Perhitungan (3 item pertanyaan x responden)	Persentase
1	Prioritas	6	CI = 12/12 x 100 %	100
2	Ketepatan Waktu	6	CI = 10/12 x 100 %	55,6
3	Manfaat	6	CI = 2/12 x 100 %	11,0
4	Hasil	6	CI = 8/12 x 100 %	44,4
<i>Total</i>		6		211

Sumber : Data primer yang diolah

Data dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prioritas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator prioritas dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (100 %) penyertaan modal ke BUMDES merupakan prioritas utama.
2. Ketepatan Waktu Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator ketepatan waktu dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (55,6 %) penyertaan modal ke BUMDES penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah tepat waktu dan (44,4 %) tidak tepat waktu.
3. Manfaat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari

indikator manfaat dari 6 orang yang diteliti menunjukkan (11 %) penyertaan modal ke BUMDES dapat menunjang perekonomian desa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makan-minum, pakaian, air minum, tempat tinggal, pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sedangkan (89 %) penyertaan modal ke BUMDES tidak dapat menunjang perekonomian desa maupaun peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

4. Hasil Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator manfaat dari 6 orang yang diteliti menunjukkan

(44,4%) penyertaan modal ke BUMDES menunjukkan adanya unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES, tersedianya barang-barang kebutuhan dan terjangkauanya harga-harga kebutuhan pokok oleh masyarakat, adanya kegiatan/program

yang didanai dari Pendapatan Asli Desa yang didapat dari BUMDES, sedangkan (55,6 %) menunjukkan hal sebaliknya.

C. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan metode Analisis Capaian Indikator, maka hasil analisisnya dapat direkap sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa per Bidang Kegiatan

No	Indikator	Persentase	Kategori
<i>A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>			
1	Prioritas	100	
2	Ketepatan Waktu	78	
3	Manfaat	100	
4	Hasil	72	
<i>Total</i>		350	
Capaian Indikator : $350/400 \times 100 \%$		88	Cukup Efektif
<i>B. Bidang Pembangunan Desa</i>			
1	Prioritas	87,5	
2	Ketepatan Waktu	50	
3	Manfaat	58,3	
4	Hasil	62,5	
<i>Total</i>		258,3	
Capaian Indikator : $258,3/400 \times 100 \%$		64,58	Kurang Efektif
<i>C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>			
1	Prioritas	100	
2	Ketepatan Waktu	89	
3	Manfaat	17	
4	Hasil	72	
<i>Total</i>		278	
Capaian Indikator : $278/400 \times 100 \%$		69	Kurang Efektif
<i>D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>			
1	Prioritas	100	
2	Ketepatan Waktu	67	
3	Manfaat	33	
4	Hasil	50	
<i>Total</i>		250	
Capaian Indikator : $250/400 \times 100 \%$		63	Kurang Efektif
<i>E. Bidang Penyertaan Modal ke BUMDES</i>			
1	Prioritas	100	
2	Ketepatan Waktu	55,6	
3	Manfaat	11	
4	Hasil	44,4	

<i>Total</i>	<i>211</i>	
Capaian Indikator : 211/400 X 100 %	52,75	Tidak Efektif

Sumber : Data primer yang diolah

D. Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analisis Capaian Indikator sesuai tabel diatas, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah (88 %) yang ketika diukur dengan menggunakan Indikator Pengukuran Efektivitas sesuai Kemendagri No.690.900.327 adalah cukup efektif.

2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analisis Capaian Indikator sesuai tabel diatas, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik pada Bidang Pembangunan Desa adalah (64,58 %) yang ketika diukur dengan menggunakan Indikator Pengukuran Efektivitas sesuai Kemendagri No.690.900.327 adalah kurang efektif.

3. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analisis Capaian Indikator sesuai tabel diatas, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah (69 %) yang ketika diukur dengan menggunakan Indikator Pengukuran Efektivitas sesuai Kemendagri No.690.900.327 adalah kurang efektif.

4. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analisis Capaian Indikator sesuai tabel diatas, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah (63 %) yang ketika diukur dengan menggunakan Indikator Pengukuran Efektivitas sesuai Kemendagri No.690.900.327 adalah kurang efektif.

5. Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Penyertaan Modal ke BUMDES

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analisis Capaian Indikator sesuai tabel diatas, dengan demikian hasil

penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Helebeik pada Bidang Penyertaan Modal ke BUMDES adalah (52,75 %) yang ketika diukur dengan menggunakan Indikator Pengukuran Efektivitas sesuai

Kemendagri No.690.900.327 adalah tidak efektif.

Dengan demikian untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Helebeik yang tertuang dalam 5 bidang kegiatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa per Bidang Kegiatan

No	Bidang Kegiatan	Indikator			
		Prioritas	Ketepatan waktu	Manfaat	Hasil
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	100	78	100	72
2.	Bidang Pembangunan Desa	87,5	50	58,3	62,5
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100	89	17	72
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100	67	33	50
5.	Bidang Penyertaan Modal untuk BUMDES	100	55,6	11	44,4
<i>Total</i>		<i>487,5</i>	<i>339,6</i>	<i>219,3</i>	<i>300,9</i>
<i>CI : SI/TS x 100</i>		<i>97,5</i>	<i>67,92</i>	<i>43,86</i>	<i>60,18</i>
<i>CI : SI/TS x 100</i>		<i>: 1368/2000 x 100 = 67,37 %</i>			

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator Prioritas adalah 97,5 %.
- b. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator Ketepatan Waktu adalah 67,92 %.

c. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator Manfaat adalah 43,86 %.

d. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dari indikator Hasil adalah 60,18 %.

Oleh karena itu Efektivitas Pengelolaan Aloasi Dana

Desa Helebeik Tahun 2018 yang ketika ukur dengan Indikator Pengukuran Efektivitas menurut Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 yang didukung juga dengan teori Mahmudi (2015) adalah 67,37 % dan ada dalam kategori kurang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa :

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan hanya 50 % dan tergolong kecil dan manfaat yang didapat dari kegiatan pembangunan hanya 58,3 % dan apabila diukur maka kategorinya adalah tidak efektif.
2. Manfaat yang didapat dari kegiatan pembinaan masyarakat seperti pelatihan linmas, pembinaan organisasi perempuan/PKK, pembinaan lembaga adat dan penyelenggaraan olahraga hanya 17 % yang mana bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan bila dikategorikan maka kategorinya adalah tidak efektif.
3. Kegiatan pelatihan menjahit dan meubeler sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dimana hanya 33 % kesejahteraan itu dicapai dan jika dikategorikan maka tidak efektif.
4. Penyertaan modal yang dikelola oleh BUMDES tidak dapat menunjukan perannya sebagai penggerak perekonomian desa maupun penunjang Pendapatan Asli Desa (PAD) yang mana

bahwa ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok hanya 11 %, 44 % ada unuit-unit usaha yang dijalankan, namun ketepatan waktu dalam pengelolaan sudah mencapai 55,6 %, sedangkan tidak ada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dibagikan untuk desa dalam membiayai kegiatan lainnya. Kategori ini adalah tidak efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Aparat Pemerintah Desa Helebeik agar dalam melaksanakan ataupun menyelesaikan kegiatan pembangunan untuk selalu tepat waktu, dan selalu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai.
2. Diharapkan agar Aparat Pemerintah Desa Helebeik dalam penyusunan suatu program kegiatan untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu indikator utama.
3. Diharapkan agar Aparat Pemerintah Desa Helebeik dalam merencanakan, melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat tidak sekedar pelatihan semata tapi harus ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana prasara pendukung untuk pengembangan usaha dimaksud.
4. Diharapkan agar Aparat Pemerintah Desa Helebeik dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Pengurus BUMDES terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, program kegiatan yang dijalankan, pencapaian target sehingga keberadaan BUMDEs sebagai penggerak

perekonomian desa dan penunjang pendapatan asli desa dapat dicapai.

fiskal terhadap perekonomian daerah di indonesia. Institute Pertanian Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal JIBEKA*. Vol 10, 26–32.
- Edy Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana
- Fahri, L. N. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*, 75–88.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: STIM YKPN
- [Latif, A. (2014). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan*. *Jurnal Madani*, 4(1).
- Nugroho, & Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Prasetyanto. (2012). *Dampak alokasi dana desa pada era desentralisasi*
- Prasetyo, Y.& Masdjojo, G. N. (2013). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper Unisbank* (pp. 978–979).
- Pressman, J.L. and Wilsdavky.1973. *Implementation*. Barkley and Los Angels. University of California Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18
- Rusydi, H. M. (2012). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar*. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152–176.
- Saputra, I. W. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 2009(2).
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. (Konsep, Strategi dan Kasus), Kerjasama Yayasan Pembeaharuan Administrasi Publik Indonesia-Lukman Offset, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah